

# KERUKUNAN MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA BANUROJA, GORONTALO

## *THE HARMONY OF MULTICULTURAL SOCIETY IN BANUROJA VILLAGE, GORONTALO*

*Hasanuddin*

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado  
Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan V Manado  
Email: anwar\_hasanuddin@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 5 April 2018. Naskah direvisi tanggal 23 April 2018. Naskah disetujui tanggal 18 Mei 2018

### **Abstrak**

Masyarakat Banuroja adalah masyarakat yang multikultural terdiri dari berbagai suku bangsa, dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda. Walaupun masyarakat Banuroja memiliki keanekaragaman suku bangsa dan agama, namun di Banuroja tidak pernah terjadi konflik. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana masyarakat Banuroja menjaga kerukunan dalam menghindari terjadinya konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan sikap kepercayaan. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga faktor pendukung terbangunnya kerukunan masyarakat multikultur dan agama yaitu solidaritas dari berbagai sukubangsa dan agama dalam bentuk toleransi; para tokoh masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan kesetaraan masyarakat; dan peranan Pesantren Salafiyah Syafiyah dalam menjaga kerukunan dan mempersatukan masyarakat. Kerukunan yang terbangun di Banuroja adalah kerukunan dan toleransi dari paradigma pluralisme. Masyarakat Banuroja menerima berbagai agama dan etnis dengan upaya menata keragaman dalam membina kerukunan. Berdasarkan pembagian lima kategori multikulturalisme oleh Bikhu Parekh, maka masyarakat Banuroja termasuk kategori multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

**Kata Kunci:** Banuroja, kerukunan, multikultur, Gorontalo

### **Abstract**

*Banuroja society is a multicultural society consisting of various tribes, where each tribe has a different culture. Although the Banuroja people have ethnic and religious diversity, there is no conflict in Banuroja. This paper describes how the Banuroja people maintain harmony in avoiding conflict. This research uses qualitative method by describing and analyzing phenomenon, event, social activity, and attitude of trust. Data collection through interview, observation, and literature study. The result of the research shows that there are three supporting factors to build the harmony of multicultural society and religion that is solidarity from various ethnic and religion in the form of tolerance; community leaders in maintaining the balance and equality of the community; and the role of Salafiyah Syafiyah Pesantren in maintaining harmony and uniting society. The harmony built in Banuroja is the harmony and tolerance of the pluralism paradigm. Banuroja people accept various religions and ethnicities by organizing diversity in fostering harmony. Based on the division of five categories of multiculturalism by Bikhu Parekh, the Banuroja society belongs to the category of autonomic multiculturalism, the plural society in which cultural groups seek to achieve equality with the dominant culture and desire life within a collectively acceptable political framework.*

**Keywords:** Banuroja, harmony, multicultural, Gorontalo

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai bangsa yang prualis, multikultur atau multi-etnik dengan jumlah suku bangsa (*ethnic group*) termasuk yang

terbesar di dunia. Menurut Melalatoa (1995), di Indonesia ada sekitar 577 hingga 660 suku bangsa. Masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang besar maupun kecil masing-

masing mengembangkan kebudayaan sebagai perwujudan berbangsa aktif terhadap lingkungan pendukungnya masing-masing. Demikian aneka ragam kebudayaan yang berkembang di Indonesia dihayati sebagai kerangka acuan dalam bersikap dan menentukan tindakan, serta sebagai tipe pengenalan yang membedakan diri dari kelompok suku bangsa yang lain. Hal ini dibedakan dari bahasa yang digunakannya, adat kebiasaan, wilayah persebaran, dan golongan ras (Budhisantoso, 1991: 61-62).

Kondisi ini merupakan kebanggaan tersendiri, namun keragaman tersebut merupakan akar berbagai konflik sosial yang terjadi di berbagai tempat. Kondisi ini menuntut adanya sifat toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan suku, adat istiadat, dan agama bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus diserasikan untuk mencapai cita-cita bersama menuju kebahagiaan bersama sebagai bangsa. Hal ini menegaskan bahwa pembentukan karakter (*character building*) menjadi penting agar tercapai "*nation building*" dalam masyarakat dengan komposisi multikultural.

Banuroja adalah desa yang mempunyai keunikan dan paling khas dibandingkan desa-desa lainnya di Indonesia. Penduduk Banuroja untuk ukuran suatu desa sangat heterogen karena berasal dari sembilan etnis yaitu: Bali, Jawa, Sasak, Gorontalo, Sunda, Minahasa, Bugis, Betawi, dan Batak. Selain itu, penduduknya memeluk empat agama, yaitu Islam, Hindu, Kristen Protestan, dan Katolik. Desa Banuroja telah menjadi wadah yang mempertemukan berbagai macam etnis, agama, dan budaya. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Banuroja dengan komposisi kultur dan agama yang majemuk, merupakan sampel yang representatif untuk memahami masyarakat multikultur dalam membangun toleransi, kesetaraan, dan solidaritas.

Kerukunan suku bangsa dan umat beragama bagi masyarakat Desa Banuroja tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya yang kompleks dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat multikultural Banuroja memiliki warna yang beragam dan didominasi oleh etnis Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo, dan Jawa. Hal ini sesuai dengan akronim dari nama Desa Banuroja, yaitu Ba (Bali), Nu (Nusa Tenggara), Ro (Gorontalo), dan Ja (Jawa). Penamaan Banuroja dapat menjadi simbol pemersatu masyarakatnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat hidup rukun dan damai. Artinya masyarakat Banuroja

merupakan alat yang dapat mempersatukan simpul-simpul etnis sebagai satu kesatuan.

Pengaruh kehidupan masyarakat multikultural sangat terasa pada komunitas publik, dalam kaitannya dengan tujuan penelitian ini antara lain tampak dalam kerukunan sosial yang terbangun dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana terbentuknya kerukunan sosial masyarakat multikultur di Banuroja. Kajian tentang proses kerukunan masyarakat Banuroja dimaksudkan untuk mencari hubungan-hubungan kausalitas sebagai daerah transmigrasi yang secara kronologis telah terbentuk sejak tahun 1981. Demikian pula kajian tentang hubungan interaksi antar-etnis dan agama untuk memahami strategi kerukunan sosial yang terbangun dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.

## **Tinjauan Pustaka**

### ***Kerukunan***

Kerukunan merupakan istilah yang mempunyai makna baik dan damai. Menurut Magnis Suseno (2001: 39), bahwa kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan serta bersatu dalam rangka untuk saling membantu. Kerukunan berkonotasi sebagai kehidupan bersama dalam masyarakat dengan sepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan konflik. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang bercirikan saling menerima, menghargai, kebersamaan dan toleransi (Ali, dkk, 2009: 301). Kerukunan secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan.

Selain bermakna sebagai kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram, kerukunan juga bermakna sebagai proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan. Untuk mencapai kerukunan seperti itu, tentu diperlukan adanya proses dialog, saling terbuka, saling menerima, saling menghargai, serta saling menanamkan rasa cinta-kasih.

Selanjutnya paradigma yang terkait dengan kerukunan adalah pluralisme. Pluralisme ini semacam perkembangan dari inklusivisme. Jika inklusivisme meyakini adanya kesamaan substansial pada yang lain, maka pluralisme justru meyakini adanya perbedaan-perbedaan.

Pluralisme juga membangun kemungkinan kerja sama dalam perbedaan tersebut setelah membuka pemahaman yang konstruktif terhadap perbedaan. (Legenhausen, 2002: 56).

### **Multikulturalisme**

Multikultural adalah masyarakat yang kompleks yang membawa membawa banyak konsekuensi, baik berupa peluang maupun tantangan dalam pembangunan. Masyarakat multikultural menurut Watson (2000: 1) memaknai sebagai masyarakat yang di dalamnya berkembang banyak kebudayaan. Secara implisit istilah multikultural adalah konsep kultur yang merujuk pada kesamaan bahasa, sejarah, keyakinan agama, asal wilayah geografis, ras, kebangsaan, dan etnis. Demikian pula Suryadinata (2004: ix) mengartikan masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai.

Suparlan (2002) menjelaskan bahwa akar multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dikutip dari Fay, Jary dan Jary, Watson, dan Reed, ia menguraikan bahwa multikulturalisme merupakan acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural.

Parekh (2008: 264-268) mengelompokkan lima macam multikulturalisme. *Pertama* adalah multikulturalisme *isolasionis*, yaitu kelompok masyarakat yang menerima keberagaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya. *Kedua*, multikulturalisme *akomodatif*, yaitu kelompok masyarakat multikultural yang merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. *Ketiga*, multikulturalisme *otonomis*, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural minoritas berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya kelompok mayoritas dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. *Keempat*, multikulturalisme *kritikal* atau *interaktif*, yaitu kelompok minoritas yang menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan

dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok mayoritas cenderung menolak tuntutan ini, bahkan berusaha menerapkan budaya mayoritas dengan mengorbankan budaya kelompok minoritas, sehingga ada perlawanan dari kelompok minoritas. Kelima, multikulturalisme *kosmopolitan*, yaitu kelompok masyarakat yang berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan suatu komunitas masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam memahami kerukunan masyarakat multikultural Banuroja, digunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Moleong, 2007: 7). Metode kualitatif merupakan pilihan yang paling membantu untuk membaca proses perubahan situasi sosial (Denzim dan Lincoln, 1996: 207).

Untuk memperoleh bahan kajian, dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dari buku-buku dan kajian-kajian yang berhubungan dengan model kerukunan masyarakat multikultur. Selain itu dilakukan pengamatan (*observasi*) pada aspek-aspek sosio-kultural dan agama mencakup permukiman masyarakat, aktivitas ekonomi, keagamaan, dan seni-budaya. Begitupula dilakukan wawancara mendalam (*indepthinterview*) pada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kondisi sosio-kultural yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Banuroja.

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **Identifikasi Lokasi**

Desa Banuroja adalah satu wilayah yang secara administratif dibentuk pada tahun 2003, hasil pemekaran Desa Manunggal Karya. Letak Banuroja berada di antara 121°788108' Bujur Timur dan 0°588141' Lintang Utara, termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo.

Secara umum jumlah penduduk Banuroja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun kenaikannya tidak signifikan. Pada tahun 2006, penduduk berjumlah 865 jiwa dengan 248 Kepala

Keluarga (KK), tahun 2011 berjumlah 974 jiwa dengan 268 KK, dan tahun 2014 berjumlah 1.056 jiwa dengan 318 KK. Berdasarkan data tahun 2014, jumlah penduduk menurut suku bangsa dihuni oleh sembilan suku bangsa. Adapun perincian suku bangsa berdasarkan jumlah penduduk mayoritas adalah Bali sebanyak 411 jiwa, Jawa 282 jiwa, Sasak (Lombok) 281 jiwa, Gorontalo 34 jiwa, Minahasa 29 jiwa, Sunda 10 jiwa, Bugis 4 jiwa, Betawi 3 jiwa, dan Batak 2 jiwa.

Penduduk Desa Banuroja umumnya memeluk agama Islam dengan jumlah 613 jiwa berasal dari masyarakat Jawa, Gorontalo, Sasak (Lombok), Sunda, Bugis, dan Betawi. Selanjutnya pemeluk agama Hindu berjumlah 405 jiwa dan umumnya dianut masyarakat dari Bali. Kemudian pemeluk agama Kristen Protestan jumlah 35 jiwa, dan Katolik berjumlah 3 jiwa yang dianut dari Minahasa dan Batak. Untuk Prasarana ibadah terdapat sebuah masjid, dua mushollah, dua pura, dua gereja diperuntukkan bagi pemeluk agama Kristen Protestan, dan pemeluk agama Katolik melakukan ibadah di Marisa (ibukota kabupaten), karena belum dibangunnya gereja Katolik (Data Desa Banuroja tahun 2015).

Desa Banuroja sebelumnya termasuk wilayah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Marisa I Sub B, dan bagian dari pemukiman transmigrasi yang telah dihuni sejak awal dekade 1980-an. Pada 17 Januari 1981, UPT Marisa I Sub A dan UPT Marisa I Sub B dilakukan penyatuan wilayah untuk membentuk sebuah desa bernama Manunggal Karya. Pada tahun 2003, Desa Manunggal Karya dimekarkan dengan membentuk desa baru dinamakan Banuroja.

### **Toleransi dalam Keragaman Identitas**

Isu mengenai toleransi, identitas, dan pluralitas menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia. Para pengamat budaya Indonesia mulai mengkhawatirkan bakal hilangnya rantai pemersatu bangsa (*chain of national unity*). Beberapa pakar kebudayaan mengungkapkan bahwa nilai toleransi bukanlah sebuah nilai yang hadir pada dirinya sendiri. Toleransi bersumber dari adanya nilai empati yang telah ada dalam hati setiap manusia. Semakin tinggi empati seseorang, semakin tinggi pula kemampuan orang itu membangun nilai toleransi, yaitu kemampuan untuk menerima dan menghargai adanya perbedaan (Taum, 2006: 5-6).

Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat yang pluralisme atau

keragaman etnis dan agama. Perbedaan cara pandang, kehidupan, kondisi sosial ekonomi pada masing-masing tahapan kebudayaan sangat potensial menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial budaya cukup banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik sosial budaya lebih banyak terkait dengan realitas suku bangsa yang sangat beragam, lengkap dengan tradisi dan adat istiadatnya. Perbedaan dalam tradisi dan adat istiadat tidak jarang masih disertai persepsi stereotipikal di antara suku bangsa dengan suku bangsa lain. Persepsi stereotipikal dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan di antara berbagai suku bangsa, seperti pada tahun 1996 kasus suku Madura konflik dengan suku Melayu dan Dayak (Azra, 2015: 18).

Masyarakat Banuroja yang mayoritas dari Bali, dan pemeluk Islam mayoritas dianut di luar dari orang Bali telah mejalani pola kehidupan sehari-hari dengan sikap toleransi, baik toleransi dalam kehidupan antar-etnis maupun dalam kehidupan antar beragama. Masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan agama yang berbeda merasakan ada rasa saling menghargai, menghormati, dan kesetaraan, sehingga konflik antar agama dan etnis dapat dibendung. Masyarakat Banuroja telah mencerminkan hidup toleransi yang harmonis dan saling mengisi dalam setiap kekurangan dan perbedaan yang ada.

Masyarakat di desa ini memegang prinsip “Bali, Jawa, dan Lombok sama-sama pendatang, jadi lebih baik mengutamakan kerja sama dari pada mencari masalah yang hanya merugikan semua dan tidak ada untungnya.” Begitu pun dalam kehidupan beragama untuk menyiarkan agama melalui ceramah dan berdakwah kami tidak melakukan cara dakwah Islami tetapi dakwah dengan metode nasionalisme, sehingga tidak mengganggu hubungan keagamaan yang telah kami jalin puluhan tahun. Bahkan pada waktu pembangunan pesantren pun orang-orang Bali ikut bekerja membangun, bahkan pelatih sepak bola di pesantren adalah pendeta gereja. Ketika pesantren mengadakan majelis ta’lim, masyarakat yang berasal dari etnis dan agama berbeda kami undang, namun statusnya hanya mendengarkan (Wawancara K.H Gofir Nawawi, Pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. 21/6/2015 di Desa Banuroja).

Hal tersebut di atas, merupakan manifestasi rasa kebersamaan bahwa kehidupan ini berlangsung serasi, agar kehidupan rukun yang telah dipelihara selama puluhan tahun dapat terus berlangsung. Hubungan yang harmonis mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga perbedaan dapat diatasi dengan baik tanpa harus melalui konflik yang berkepanjangan seperti yang terjadi di berbagai daerah.

Desa Banuroja sebagai wadah penduduk berasal dari berbagai etnis dan agama, sangat rentang terjadinya sebuah konflik. Masyarakat terutama yang mempunyai karakter multi-etnis dan multi-agama perlu senantiasa menggali wawasan kebangsaannya untuk menghindari ketegangan-ketegangan baru. Konflik horizontal antar kelompok masyarakat tertentu di Indonesia, seperti di Ambon, Kupang, Sambas, Palangkaraya, Sampit, Papua, Poso, Lombok, Tasikmalaya, Jakarta, Solo, dan Surabaya seharusnya menggugah bangsa ini untuk kembali merenungi pertanyaan-pertanyaan mendasar (Taum, 2006: 1).

Terdapat tradisi yang unik dalam kehidupan masyarakat Banuroja yang sampai sekarang tetap terjaga. Tradisi tersebut adalah bersilaturahmi antarpemeluk agama pada hari besar agama masing-masing. Misalnya, saat umat Islam merayakan Idul Fitri, warga pemeluk Hindu dan Kristen ikut serta meramaikan suasana. Warga pemeluk Hindu mengirimkan buah-buahan dan umat Kristiani menyerahkan aneka macam makanan kepada penduduk muslim yang merayakan.

Kue yang kami bagikan pada hari raya Idul Fitri adalah kue yang kami pesan kepada orang Muslim agar tidak menimbulkan kecurigaan. Itu sudah kami lakukan setiap Idul Fitri. Jika umat Hindu sedang merayakan Nyepi, maka penduduk tidak membuat keramaian. Suara azan pun tidak pakai pengeras suara (wawancara Djeek Detamor Gandey, *penatua* atau membantu tugas pendeta. 18/6/2015 di Desa Banuroja).

Pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, K.H Abdul Ghofur Nawawi, mengakui, saat umat Hindu dan Kristen merayakan hari besar agama, pimpinan dan perwakilan santri pesantren berkunjung ke tempat penduduk yang merayakannya. Maksud kunjungan tersebut semata-mata untuk bersilaturahmi dengan tokoh dan warga Hindu dan Kristen. Jalinan silaturahmi

di antara mereka terus di jaga baik pada Hari Nyepi maupun Natal.

Saya dan beberapa santri biasa mengunjungi tokoh dan pemuka dari Hindu atau Kristen ketika perayaan Nyepi dan Natal. Biasanya kami bawakan mereka hasil-hasil bumi, seperti jagung atau jeruk (wawancara Siswanto, tokoh masyarakat dari Jawa. 18/6/2015 di Desa Banuroja).

Begitupula pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pondok pesantren seperti pengajian dan ceramah, juga dihadiri penduduk dari penganut non muslim.

Bukan hanya pada saat perayaan hari besar agama, pesantren yang memiliki agenda rutin seperti pengajian akbar sekali dalam sebulan pun turut dihadiri warga umat Hindu dan Kristen. Saya tidak mempersoalkan materi dalam pengajian. Sebab, yang dibahas adalah bagaimana menjaga kerukunan antarumat dan sikap saling toleransi. Jika tak ada kegiatan penting, saya turut menghadiri pengajian akbar yang diselenggarakan pihak pesantren sekali dalam sebulan (wawancara, Djeek Detamor Gandey, 18/6/2015 di Desa Banuroja).

### **Kerukunan Masyarakat Multikultur**

Kerukunan dalam sebuah tatanan masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan budaya sangat sulit ditemukan. Masyarakat Banuroja merupakan potret dari keragaman masyarakat Indonesia, yang mampu mengkonstruksi sebuah keragaman identitas menjadi suatu kehidupan yang harmonis dan mampu menciptakan solusi bagi setiap gejala yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Di sisi lain, Indonesia menganut multikulturalisme yang tercermin dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu pengakuan terhadap multikulturalitas etnik, budaya, agama, dan ras, namun menuntut adanya persatuan dalam komitmen politik membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan pada beberapa tempat, kemajemukan masih dianggap sebagai sumber permasalahan konflik, yang membuktikan bahwa realitas multikulturalitas belum dipahami dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat. Multikulturalisme menjadi suatu kebutuhan bersama apabila kita mengakui realitas multikulturalitas dalam

masyarakat. Dalam konteks inilah, peran serta masyarakat memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong agar kemajemukan dapat tampil sebagai suatu kekuatan untuk membangun bangsa dan negara.

Bangsa Indonesia harus dipandang dari sudut multikulturalisme, sebagaimana dikemukakan Magnis Suseno (2005: 216) bahwa Indonesia hanya dapat bersatu jika pluralitas yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Artinya, penegakan kesatuan Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang yang baik kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu, diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional, integrasi nasional, dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa. Sebagaimana juga dilakukan bagi para tokoh masyarakat Banuroja.

K.H. Ghofir Nawawi merupakan perintis pesantren awal 1980-an. Kini beliau yang menjadi tokoh sentral masyarakat dari Desa Banuroja. Gagasan dan pandangan keagamaannya yang toleran, terbuka, menjadikan K.H. Ghofir sebagai tempat berbagi informasi bagi masyarakat setempat yang sangat beragam. Tidak jauh dari pesantren berdiri sebuah pura desa yang cukup luas. Di sebelahnya lagi ada Gereja Protestan Indonesia Gorontalo dan Gereja Pentakosta. Bahkan sewaktu saya ingin membuat gambar salib dan pohon natal dari bahan kaca grafir, saya meminta masukan K.H. Ghofir apakah dibolehkan atau tidak. Kemudian beliau mempersilahkan kaca jendela rumah saya memakai gambar salib dan pohon natal (wawancara Djeek Detamor Gandey, 8/6/2015 di Desa Banuroja).

Sangat penting bagi semua wilayah yang rawan konflik, untuk memandang pada keharmonisan masyarakat Banuroja tersebut. Untuk itu, perlu dibuat acuan untuk mendamaikan daerah-daerah yang rawan konflik sosial, baik yang disebabkan oleh masyarakat multietnik maupun masyarakat multiagama yang mempunyai sikap egosentrisme. Masyarakat Banuroja mampu mengkonstruksi kerukunan dalam masyarakat yang beragam demi terciptanya integrasi sosial.

Warga Desa Banuroja sudah lama menerapkan prinsip toleransi. Bahkan dalam komposisi struktur jabatan dan kepengurusan desa, telah disepakati harus mencerminkan keterwakilan dari berbagai etnis dan pemeluk agama. Sebelumnya pada saat saya menjabat sebagai kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa berasal dari Bali, Sekretaris Desa dari Gorontalo. Adapun empat kepala dusun berasal dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Bahkan sebelum saya menjabat kepala desa, dijabat penganut Kristen yang notabene dari kelompok minoritas. Tidak ada batasan etnis dan agama untuk tampil sebagai kepala desa. Ini juga salah satu cara agar tidak timbul kecemburuan sosial di Banuroja (wawancara Abdul Wahid, tokoh masyarakat dari Lombok. 16/6/2015 di Desa Banuroja).

Hal yang paling prinsip adalah kesadaran sebagai seorang pendatang atau perantau yang menjadikan mereka hidup berdampingan antar kelompok dengan kelompok lainnya. Sangat kurang ditemukan dalam kehidupan masyarakat multikultur, tentang sikap toleransi. Salah satu sikap toleransi yang dilakukan masyarakat Banuroja.

Pada waktu pembangunan pesantren orang-orang Bali dan etnis lain ikut bekerja membangun, tanpa melihat perbedaan dalam diri masing-masing, bahkan pelatih sepak bola di pesantren adalah pendeta, beliau sering melati anak-anak pesantren untuk olahraga. Kami hidup di wilayah ini lebih mengutamakan kerja sama dari pada individu. Ketika pesantren mengadakan majelis ta'lim orang Bali dan etnis lain diundang untuk mendengarkan, mereka sangat antusias untuk menghadiri undangan tersebut (wawancara K.H. Gofir Nawawi, 20/6/2015 di Desa Banuroja).

Kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dalam masyarakat Banuroja, mereka tidak terpropokasi dengan isu-isu yang dapat menimbulkan konflik. Mereka memandang bahwa masyarakat Banuroja adalah satu keluarga, tanpa memandang berasal dari etnis dan agama.

Kami di sini tidak melihat perbedaan yang ada, di sini masyarakat yang berbeda etnis sudah menjadi sekeluarga. Tahun lalu desa ini di kunjungi langsung Kementrian Agama pusat dan mendapat penghargaan, tidak mudah terpropokasi dengan isu dari

manapun. Kekeluargaan yang lebih kita utamakan dalam menjaga kerukunan antar etnis dan agama (wawancara Djeek Detamor Gandey, 19/6/2015 di Desa Banuroja).

Terciptanya hubungan yang harmonis melalui toleransi dan kerukunan dalam masyarakat Banuroja menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan memberi penghargaan kepada masyarakat Banuroja yang bertujuan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya.

Desa ini mendapat penghargaan pada waktu adanya Gema Panua yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Pohuwato, karena kerukunannya terjaga, kita saling menghormati sesama etnis dan agama, artinya kami dari Islam selalu menjaga agar tidak saling mengganggu antara satu sama lain begitu pula teman-teman yang dari agama lain. Bahkan kami selalu di beri nasehat oleh orang-orang alim khususnya Ustad Gofir, selalu memberikan ceramah panjang lebar tentang menjaga kerukunan dengan cara saling menghargai dan menghormati, sehingga kami menjaga hubungan antar sesama etnis. Kami juga saling menyapa dan menghormati antar sesama baik di lahan pertanian maupun di jalan. Ada majelis taklim akbar disini bergantian kadang di Taluditi kadang juga dilaksanakan di pesantren jadi saling bergiliran, semua etnis diundang sehingga komunikasi dan interaksi berjalan dengan baik (wawancara Darma Halubangga, Kepala Desa Banuroja. 13/6/2015 di Desa Banuroja).

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015, yang dapat menciptakan potensi konflik. Pemerintah daerah berusaha melakukan sosialisasi demi terciptanya keamanan di daerah dengan menjaga keamanan desa. Rasa saling menghormati baik di dalam masyarakat maupun hubungannya dengan pemerintah daerah merupakan modal utama dalam terpeliharanya harmonisasi dalam masyarakat multikultur. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan kerukunan tersebut, bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mendamaikan beberapa daerah yang rawan konflik sosial.

### **Modal Sosial Sebagai Pemersatu Budaya**

Modal sosial bertujuan menciptakan aturan formal yang mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Modal sosial muncul karena

adanya kebiasaan masa lalu yang telah dilakukan hingga saat ini dalam hubungan sosial di masyarakat sebagai individu maupun kelompok. Modal sosial mengedepankan nilai budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap setiap individu untuk bekerjasama, saling percaya, serta memahami satu sama lain, sehingga dapat memperlakukan orang lain sebagai sesama teman bukan lawan atau pihak yang menjadi sasaran mencari keuntungan (Lawang, 2005: 210).

Dalam konsep modal sosial, terdapat tiga unsur yang saling berkaitan yaitu: pertama adanya sikap percaya, dan keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial lainnya yang didasari oleh keyakinan bahwa yang lain akan melakukan sikap yang sama tanpa satu sama lain. Kedua adalah jaringan kerjasama antar manusia. Hubungan antar simpul-simpul yang ada pada suatu jaringan, hanya dapat diketahui dari interaksi sosial di antara mereka. Interaksi berfungsi menyebarkan informasi ke seluruh anggota, yang memungkinkan mereka mampu mengambil tindakan secara kolektif untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Ketiga adalah norma yaitu aturan yang diharapkan dapat dilaksanakan dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma yang disepakati bersama dengan memberikan sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar kebiasaan telah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat (Lawang, 2005: 50-76).

Dalam interaksi masyarakat Banuroja terdapat suatu modal sosial (*social capital*) yang dijadikan pegangan sebagai rasa saling percaya. Rasa saling percaya antar masyarakat yang dibangun dengan saling jujur antara satu sama lain. Saling percaya adalah modal sosial yang utama dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Apabila rasa percaya kepada orang lain akan hilang, maka akan menimbulkan gejala yang merambah ke konflik sosial. Modal sosial yang dijadikan instrumen perekat pada masyarakat yang multikultur, bukan hanya pada rasa saling percaya, tetapi kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong bagi masyarakat Banuroja sering dilakukan di kantor desa dan tempat umum lainnya melibatkan semua unsur etnis dan agama (Bumolo, 2013: 89). Demikian pula, dalam pembangunan pesantren semua etnik dan agama membantu berdirinya Pesantren Salafiyah Safiyah. Selain itu, dalam kegiatan kerja bakti bagi masyarakat dari Bali berlaku jika tidak mengikuti kerja bakti, maka akan mendapat sanksi sosial.

Terdapat norma yang kami jadikan pegangan dalam hal gotong royong. Ketika orang tidak ikut kerja bakti misalnya di kantor desa, pura, masjid, dan sebagainya. Mereka akan kena denda sebesar Rp.1000 tapi rasa yang sangat ditekankan di sini, misalnya saya tidak ikut kerja bakti di denda Rp.1000 itu tak seberapa jumlahnya, saya bisa mendapatkan lebih dari itu, tetapi bagaimana dengan perasaan. Jadi, denda itu sebenarnya hanya peringatan atau teguran saja, tetapi rasa itu yang agak berat karena nama-nama yang tidak ikut tersebut akan dibacakan di forum, kami punya forum sendiri, setiap hari Rabu Kliwon kami mengadakan forum adat, dan akan dibacakan siapa-siapa yang tidak hadir dalam acara kerja bakti tersebut (I Wayan Adha, tokoh masyarakat dari Bali. Wawancara 14 Juni 2015 di Desa Banuroja).

Saling percaya, pranata, dan norma-norma yang dimiliki bersama dapat menjadi perekat dalam masyarakat menjadi satu jalinan. Perasaan saling percaya dan saling terikat antar individu dalam norma-norma yang disepakati bersama. Bagi masyarakat Banuroja tampak pada pemilihan kepala desa, jika kepala desanya dari Bali, maka selanjutnya akan dijabat dari Jawa, Lombok atau etnik lainnya. Selain itu, jaringan sosial juga terbentuk karena adanya kerjasama antar anggota, solidaritas, partisipan, dan timbal balik. Jaringan sosial yang terbentuk pada masyarakat tampak adanya forum-forum masyarakat desa misalnya, arisan warga, acara syukuran, upacara kelahiran kematian yang mampu memperteguh eksistensi masyarakat secara internal. Demikian pula, eksistensi masyarakat secara eksternal diperteguh secara ekonomi, dalam bentuk pasar (Triyono dan Ahmad Arief, 2003: 422).

Jaringan sosial yang terbentuk pada masyarakat Banuroja tampak pada adanya forum-forum masyarakat misalnya, majelis ta'lim akbar, tadarusa ibu-ibu PKK, dan yasinan. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh etnis, kecuali tadarusan dan yasinan hanya dilakukan dari etnis yang beragama Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menciptakan komunikasi yang lebih erat di antara masyarakat.

Silaturahmi antar etnik dan agama di sini sering terjadi dan itu kami pelihara selama bertahun-tahun, sehingga sudah melekat dalam diri kami silaturahmi tersebut.

Untuk acara-acara di Islam sendiri, saya sering menghadiri terutama majelis ta'lim akbar. Apalagi ketika ada kunjungan dari pemerintah pusat pasti semua etnik dan agama menghadiri acaranya, biasanya di laksanakan di Pesantren (wawancara I Wayan Adha, 21/6/2015 di Desa Banuroja).

### **Peranan Pesantren Dalam Proses Interaksi Sosial**

Desa Banuroja mempunyai sebuah pondok pesantren Salafiyah Safiyah. Pesantren ini mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan kepada para santrinya untuk memelihara kerukunan hidup antar umat beragama dan antarsuku. Peranan pesantren dalam membina kerukunan bukan hanya dilakukan pada proses pendidikannya, tetapi juga pada hubungan komunikasi melalui kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama dan etnik.

Pesantren Salafiyah Safiyah secara rutin melakukan kegiatan majelis taklim akbar. Semua etnis dan agama diundang agar lebih memepererat silaturahmi antar agama dan etnis. Peranan pesantren dalam kegiatannya mampu membangun keragaman menjadi pemersatu dalam kehidupan toleransi.

Adanya silaturahmi dan saling koordinasi maka di situlah timbul rasa cinta antar sesama. Pesantren juga merupakan salah satu tempat yang proses silaturahmi antar etnik dan agama berjalan, misalnya, ketika ada kegiatan majelis ta'lim akbar yang dilaksanakan satu bulan sekali tepat pada minggu ketiga. Kemudian juga kegiatan tadarus Al-Qur'an dan Yasinan yang dilaksanakan satu bulan sekali yang dihadiri oleh semua etnis yang beragama Islam. Dari kegiatan tersebut, terbangun silaturahmi yang baik, sehingga interaksi antar etnik pun berjalan baik (wawancara Siswanto, 21/6/2015 di Desa Banuroja).

Pesantren Salafiyah Safiyah sebagai institusi pendidikan yang membentuk pola pikir santrinya dan masyarakat untuk saling menghargai perbedaan latar belakang etnik maupun agama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa santri dari etnik Bali, bahkan gurunya ada yang berasal dari non muslim. Begitupula pembangunan pesantren juga melibatkan masyarakat dari berbagai etnis dan agama.

Pendidikan sangat menunjang dalam kehidupan utamanya ajaran tentang kerukunan. Bahkan beberapa adik-adik kami yang dari transmigran Bali juga ikut menuntut ilmu dan sekolah di SMK Salafiyah Safiyah (wawancara I Komang Subadio, Ketua Pemuda Desa Banuroja. 19/6/2015 di Desa Banuroja).

Pada tahun 1982 pesantren dirintis dan diresmikan Nopember 1985. Pak I Wayan Ade anggota yayasan pesantren, beliau dari Bali dan beragama Hindu bahkan pada waktu pembangunan pesantren orang-orang Bali ikut bekerja membangun, bahkan pelatih sepak bola di pesantren adalah pendeta gereja. Guru-guru di pesantren pun ada juga yang beragama Hindu begitu juga dengan siswa di SMK Salafiyah ada yang dari agama Hindu. Anak-anak yang sekolah di pesantren berasal dari berbagai daerah antara lain, Sulbar, Luwuk, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Jawa, Bali, dan mereka tinggal di asrama, hanya dipungut uang lampu, masuk pondok gratis (wawancara K.H. Gofir Nawawi, 21/6/2015 di Desa Banuroja).

### **Peranan Tokoh Masyarakat**

Terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari peranan para tokoh masyarakat dalam memberi teladan, membimbing, dan mengayomi masyarakat. Beberapa tokoh berperan dalam kerukunan, di antaranya K.H Gofir Nawawi bagi masyarakat menyebutnya kyai, ustad, atau *abah*.

Masyarakat Banuroja yang terdiri dari berbagai etnis dan agama terkenal dengan kehidupan yang rukun dan damai. Faktor hidup rukun tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik di antara para tokoh adat dan agama. Salah satu tokoh yang telah dipercaya dan menjadi panutan masyarakat Banuroja adalah Haji Gofir Nawawi, pengurus Pesantren Salafiyah Safiyah. Beliau adalah tokoh sentral dalam kehidupan kerukunan dan kedamaian masyarakat Banuroja. Beliau pula yang pertama mengusulkan pemekaran dan pembentukan Desa Banuroja (wawancara Zulkifli Umar, Camat Randangan. 12/6/2015 di Kecamatan Buntulia).

K.H Gofir Nawawi adalah tokoh yang dihormati dan diterima dari semua kalangan agama maupun etnik, sehingga dalam pemberian nama desa, K.H Gofir Nawawi dipercayakan untuk mengusulkan nama desa yang baru dimekarkan tersebut.

Masyarakat sering diberi nasehat oleh orang alim, seperti Ustad Gofir Nawawi. Beliau selalu memberikan ceramah panjang lebar, sehingga kami menjaga hubungan antar sesama (wawancara Abdul Wahid, 16/6/2017 di Desa Banuroja).

Begitupula tanggapan dari masyarakat non muslim bahwa:

Masyarakat dari Hindu, Kristiani dan masing-masing etnis sangat mempercayai dan menghormati Ustad Gofir. Masyarakat telah memahami bahwa tidak mungkin orang tua seperti Ustad Gofir menjerumuskan kami ke hal-hal yang tidak baik. Untuk itu beliau menjadi panutan dan selalu menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Banuroja. Kadangkala jika ada santri yang sakit, saya biasanya dipanggil oleh Ustad Gofir untuk mengobati anak santri. Artinya hubungan kami dengan Ustad tidak ada jarak walaupun berbeda agama dan budaya. Kami menganggap beliau adalah panutan dan orang tua kami (wawancara Djeek Detamor Gandey, 15/6/2015 di desa Banuroja).

Perhatian K.H Gofir Nawawi terhadap hubungan keagamaan dan antaretnis cukup besar, setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat akan mengundang K.H Gofir Nawawi untuk bersama-sama mencari solusinya. Demikian pula K.H Gofir Nawawi mengajak dan memberi bantuan dana kepada petani untuk menanam jagung. Bantuan modal petani diberikan tanpa memandang latar belakang agama dan etnik wawancara (Siswanto, 19/6/2015 di Desa Banuroja). Di samping peran K.H Gofir Nawawi, terdapat juga beberapa tokoh masyarakat yang mempunyai kharismatik dan panutan dalam kehidupan masyarakat, seperti I Wayan Adha, I Wayan Ade, I Made Suhandana, Siswanto, Kusmanto, Moh. Zakpan, Abdul Wahid, dan Djeek D. Gandey. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan, dan sekaligus memelihara kerukunan.

## Potensi Konflik Masyarakat Banuroja

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi antara satu sama lain. Dalam lingkungan sosial proses interaksi antara sesama manusia selalu diwarnai dengan dua hal yang merupakan konsekuensi akibat dari proses interaksi yang dilakukan, di antaranya terjadinya konflik dan kerjasama. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Salah satu faktor penyebab konflik adalah adanya perbedaan latar belakang kebudayaan dan agama, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu potensi konflik.

Masyarakat Banuroja sebagai masyarakat multikultur dan multi agama sangat rawan munculnya potensi konflik. Latar belakang masyarakat yang beragam etnis dan agama, memungkinkan perbedaan pendapat dan seringkali konflik tidak dapat dihindari. Walaupun dalam kenyataannya, potensi konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui hubungan interaksi dan keterbukaan masyarakat Banuroja. Beberapa permasalahan dalam masyarakat Banuroja yang dapat memicu konflik di antaranya babi yang dipelihara orang Bali dilepaskan berkeliaran, sehingga seringkali masuk di pekarangan orang Lombok yang telah ditanami jagung dan sayur-sayuran. Seringkali babi yang masuk di pekarangan dibunuh oleh orang Lombok, sehingga menimbulkan gejolak di antara orang Bali dan Lombok. Guna mencegah terjadinya konflik maka pihak tokoh adat Bali dan Lombok menyelesaikannya dengan musyawarah. Kemudian diputuskan untuk mengikat dan melarang babi berkeliaran wawancara (Abdul Wahid, wawancara 17/6/2015 di Desa Banuroja).

Pergaulan generasi muda berbeda etnis dan agama seringkali juga saling berbenturan di antara mereka. Apalagi masuknya miras yang dikonsumsi pemuda dapat memicu timbulnya konflik. Jika hal ini terjadi maka masing-masing kelompok tokoh pemuda diberi nasehat oleh tokoh masyarakat dan menyelesaikan masalahnya (wawancara H. Gofir Nawawi, 22/6/2015 di Desa Banuroja). Perkelahian antara pemuda memang pernah beberapa kali

terjadi di Desa Banuroja, tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan pendekatan sesama mereka. Ketua karang taruna sering mengumpulkan dan menghimbau para remaja dan pemuda untuk saling menghargai dan membimbing adik-adiknya. Hal ini dirasakan bahwa walaupun berbeda etnis dan agama tetapi tetap satu keluarga. Tidak mengherankan, apabila hari raya agama, maka yang tidak merayakan saling mengunjungi, seperti Hari Raya Idul Fitri biasanya non muslim berkunjung ke pesantren. Begitupula sebaliknya pada hari raya Natal atau Kuningan, para pemuda pesantren akan mengunjungi para pemuda yang merayakannya. Selain itu, jika ada yang berduka atau mengadakan perkawinan, maka secara spontan para pemuda datang untuk membantu (wawancara I Komang Subadio, 16/6/2015 di Desa Banuroja).

Berangkat dari permasalahan tersebut bahwa perlu kewaspadaan bersama dalam menanggapi suatu masalah. Begitupula setiap permasalahan konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan pendekatan kekeluargaan. Hal ini mencerminkan bahwa dalam kehidupan masyarakat telah terjalin ikatan keluarga, walaupun telah ditempa oleh isu-isu yang menghasut kerukunan dalam masyarakat, namun mereka dapat menyelesaikan secara persuasif. Faktor penyelesaian juga tidak terlepas dari adanya mediator dalam hal ini tokoh masyarakat, berperan juga sebagai fasilitator sehingga hasil yang diputuskan diterima kedua belah pihak yang berkonflik.

Setelah beberapa kali terjadi perpecahan (disintegrasi) dalam masyarakat Desa Banuroja, namun semua permasalahan di antara mereka dapat diselesaikan dengan mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang berselisih melalui mekanisme adat, mekanisme agama, dan penyelesaian berdasarkan musyawarah mufakat. Kemajemukan masyarakat Banuroja dapat berpotensi membantu untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif (*negative stereotyping*) antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan hubungan ikatan solidaritas sosial.

Desa Banuroja dengan kemajemukan, baik dari sisi etnisitas maupun agama kembali terusik kedatangan misionaris. Pelayanan penginjilan untuk orang-orang di pedesaan menjadi salah satu fokus pelayanan para misionaris. Kedatangan

mereka ternyata menimbulkan kecurigaan dan kemarahan masyarakat muslim, setelah missionaris memberi bantuan kepada para penduduk miskin berupa bantuan uang, makanan, dan pakaian. Secara kebetulan, pada waktu itu terjadi kemarau panjang selama sembilan bulan, sehingga menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan dan membawa dampak bagi masyarakat mengalami krisis pangan. Kebutuhan yang semakin meningkat, membuat masyarakat menyandarkan pilihannya untuk mengikuti ajakan missionaris. Adanya iming-iming yang menjanjikan diberikan bahan-bahan keperluan sehari-hari, seperti beras, mie instan, dan sebagainya. Beberapa di antara penduduk terbujuk oleh para misionaris, sebagian dari kalangan umat Islam protes. Menteri Agama memerintahkan K.H. Gofir Nawawi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara perlahan para misionaris kembali ke tempat asal mereka masing-masing yang sebenarnya berasal dari salah satu daerah yang ada di Sulawesi, tetapi mereka mengaku datang dari Jawa dan DKI. Sebagian masyarakat kembali pada agama sebelumnya, namun ada juga yang tetap bertahan (wawancara K.H. Gofir Nawawi, 22/6/2015 di Desa Banuroja).

Selain itu, permasalahan kasus pertanahan dewasa ini sangat marak di beberapa daerah, bahkan sampai menimbulkan perpecahan konflik. Beberapa kasus pertanahan yang terjadi antara penduduk lokal, pendatang dan antar sesama transmigran merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat transmigrasi. Konflik dan kekerasan sosial ini jelas banyak terkait dengan perebutan dan keseimbangan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan politik.

Kasus pertanahan atau sengketa tanah antara para transmigran dan penduduk lokal Gorontalo merupakan salah satu permasalahan penting. Tanah yang sudah dihibakan oleh pemerintah untuk Unit Pemukiman Transmigrasi, kemudian dikuasai kembali oleh masyarakat lokal Gorontalo. Di Banuroja, kasus pertanahan dimulai dari datangnya beberapa masyarakat lokal Gorontalo. Mereka menuntut hak kepemilikan tanah yang diperuntukkan bagi para transmigran. Tanah yang dihibakan oleh pemerintah untuk Unit Pemukiman Transmigrasi diklaim sebagai tanah warisan dari leluhurnya sebelum dibukanya Unit Pemukiman Transmigrasi, tetapi tanah itu belum sempat mereka garap.

Permasalahan kasus pertanahan lebih tepat disebut dengan merebaknya politik identitas.

Politik identitas sering terjadi pada masyarakat yang multikultur, hal ini muncul ketika ada salah satu kelompok etnis yang merasa diri mereka memiliki dalam segala hal dengan asumsi adalah peninggalan leluhurnya. Mereka berasal dari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato datang ke Desa Banuroja dengan berbagai alasan demi mendapatkan tanah tersebut, hal ini membuat resah penduduk Desa Banuroja. Timbul rasa ketidaknyamanan, karena orang-orang dari Lemito datang setiap hari hanya untuk mendapatkan kembali tanah yang mereka klaim miliknya. Kasus tanah mulai terjadi pada tahun 1990-an, dan sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Sebelumnya kasus tanah telah memancing potensi konflik dan semua masyarakat transmigrasi menyatakan perang dan siap menyerang orang-orang Lemito yang datang mengklaim tanah hibah tersebut. Setelah K.H. Gofir Nawawi mengumpulkan semua tokoh masyarakat agar tidak terpancing dengan kedatangan orang-orang Lemito, maka konflik pun dapat dicegah (wawancara K.H. Gofir Nawawi, 22/6/2015 di Desa Banuroja).

Permasalahan terkait kasus tanah, telah menjadi masalah yang krusial dan fenomenal di kalangan masyarakat. Tidak hanya di Banuroja, tetapi hampir di berbagai daerah banyak kasus-kasus pertanahan belum terselesaikan. Permasalahan tanah khususnya masalah sengketa, sangat berpotensi besar dalam menciptakan konflik sosial, jika masing-masing yang bersengketa tidak menemukan solusinya. Permasalahan tanah di Banuroja tidak pernah menghasilkan solusi, walaupun masih menjadi polemik. Pihak masyarakat Banuroja mempunyai bukti bahwa tanah yang sudah hibahkan untuk UPT tersebut, dan dibuktikan dengan sertifikat tanah yang diberikan oleh pemerintah sewaktu pemberangkatan dari tempat asal, secara otomatis tanah tersebut sudah terlepas dari permasalahan kepemilikan. Sekarang ini masyarakat lokal (Lemito) yang sering datang menggugat tanah tidak terlihat lagi di Banuroja.

Merebaknya politik identitas yang terjadi pada masyarakat Banuroja adalah masalah agraria yakni kepemilikan tanah. Menurut beberapa informan yang berasal dari etnik Lombok, selain masalah tanah terdapat juga lahan yang sempat menjadi sengketa antara masyarakat Lombok dengan masyarakat lokal. Lahan dua yang luasnya sekitar dua hektar dengan status kepemilikannya oleh etnik Lombok juga digugat oleh masyarakat lokal

(penduduk Gorontalo). Guna mencegah terjadinya konflik, tim yang mengelola Program Transmigrasi dari Jakarta dikawal oleh TNI datang ke Banuroja untuk mengatasi permasalahan kasus tanah. Setelah permasalahan sengketa dapat diredam, beberapa hari kemudian masyarakat lokal kembali lagi ke lahan tersebut untuk mengklaim bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka. Akhirnya, untuk mencegah terjadinya konflik, maka pihak pemerintah daerah menawarkan solusi dengan jalan menukar lahan dua milik etnik Lombok dengan beberapa ekor sapi (wawancara Bumolo, 2013: 70; Abdul Wahid, 16/6/2015 di Desa Banuroja).

Politik identitas pada masyarakat Banuroja terjadi karena banyaknya benturan kepentingan dan fenomena ego sektoral. Politik identitas dapat berperan secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergesernya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kecenderungan menguatnya isu politik identitas dalam kasus pertanahan, tidak hanya terjadi pada transmigran Banuroja, tetapi juga di Desa Manunggal Karya.

## PENUTUP

Desa Banuroja menjadi wadah yang mempertemukan berbagai macam etnis, agama, dan budaya. Hal ini dapat dijadikan sampel yang representatif untuk memahami masyarakat multikultur dalam membangun solidaritas. Kehidupan masyarakat yang terbangun adalah kerukunan dan toleransi dari paradigma pluralisme. Pluralisme dalam konteks masyarakat Banuroja adalah menerima berbagai etnis dan agama serta upaya membangun keragaman dengan cara pandang masyarakat dalam membina kerukunan. Berdasarkan pembagian lima kategori multikulturalisme oleh Bikhu Parekh, maka kehidupan multikultural dalam masyarakat Banuroja terkategori dalam multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima.

Terdapat tiga faktor yang menjadi pendukung terbangunnya kerukunan pada masyarakat Banuroja yaitu rasa persatuan dari berbagai suku dan agama dalam bentuk toleransi; para tokoh masyarakat baik dari tokoh agama maupun tokoh

etnik dapat menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat Banuroja; dan peranan Pesantren Salafiyah Syafiiyah dalam menjaga kerukunan masyarakat.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menggali kerukunan sosial pada masyarakat multikultural yang justru mulai melembaga dalam kehidupan masyarakat Banuroja, baik secara proses terbentuknya desa maupun secara sosial melalui hubungan interaksi antarpenduduk, dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kerukunan masyarakat multikultur.

Walaupun kerukunan tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat Banuroja, namun terdapat potensi konflik terutama kasus pertanahan atau sengketa tanah dari para transmigran dengan penduduk lokal Gorontalo yang mengaku dari warisan leluhurnya. Hal ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mencari solusi agar dapat mencegah timbulnya konflik di antara mereka.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penelitian ini. Terima kasih kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado yang menugaskan untuk melakukan penelitian ini. Para tokoh masyarakat Banuroja sebagai informan atas waktu dan kesempatan yang diberikan selama penelitian. Terima kasih juga kepada Redaksi Al Qalam yang telah mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mursyid, dkk. 2009. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama Di Berbagai Daerah di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Azra, Azyumardi. 2015. "Akar Konflik keragaman: Scaling Up Kebudayaan dan Penguatan Dialog", dalam *Makalah Seminar Nasional Kebudayaan dengan tema: Membingkai Kebhinekaan, Merayakan Persatuan Kebijakan Kebudayaan dalam Mengelola Keragaman*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 30 Nopember-2 Desember 2015.
- Budhisantoso, S. 1991. "Corak Kebudayaan Indonesia", dalam *Studi Indonesia*, No. 01.

- Jakarta: Universitas Terbuka.
- Bumolo, Sahrain. 2013. "Keserasian Sosial Hubungan Antar Etnik (Suatu Studi Pada Masyarakat Multi-etnik di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato", *Skripsi*. Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
- Denzim, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (ed). 1996. *Handbook of Qualitatif Research*. Sage Publication.
- Lawang, Robert. 2005. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Legenhausen, Muhammad. 2002. *Satu Agama atau Banyak Agama*. Jakarta: Lentera.
- Magnis Suseno, Franz. 2001. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Melalatoa, M. Junus. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, Lexi. J . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism*. Bambang Kukuh Adi (terj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural", *Makalah*, pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural. Denpasar: Universitas Udayana, 16-19 Juli 2002.
- Suryadinata. 2004. *Penduduk Indonesia, Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Taum, Yoseph Yapi. 2006. "Identifikasi Isu-isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa", dalam *Makalah Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema: Masalah-Masalah Sosial Dalam Masyarakat Multi-etnik. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2006.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Triyono dan Ahmad Arief. 2003. "Modal sosial sebagai mainstream pengembangan masyarakat pesisir, sebuah pendekatan sosial untuk mendukung pembangunan lokal tipologi masyarakat pesisir", dalam *Prosiding lokakarya nasional menuju pengelolaan sumberdaya wilayah berbasis ekosistem untuk mereduksi potensi konflik antar daerah*. Yogyakarta: UGM, Fakultas Geografi, 30 Agustus 2003.
- Watson, C.W. 2000. *culturalism Concepts in the Social Studies*. Open University Press.